



**REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA MELALUI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI
INDONESIA**



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MELALUI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA

TESIS

UNIVERSITAS ANDALAS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Studi
Magister Hukum

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
NIP : 196207181988111001

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
NIP : 198111302010121005

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

UNTUK KEHIDUPAN BANGSA

Dr. Yasniwati, S.H., M.H
NIP: 197211132005012001

**HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET**

No.Reg: 14/MH/IV/2026

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENERAPAN
CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI INDONESIA**

**THE RECONSTRUCTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S AUTHORITY TO ENSURE THE
PROTECTION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS THROUGH THE IMPLEMENTATION
OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN INDONESIA**

Disusun Oleh:

Author:

**Micho Algif Fahri
2420112030**

**Program Studi : Magister Hukum
Study Program : Master of Law**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

***This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On August 14th, 2026
And Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:***

**Pembimbing I
Supervisor I**

**Prof. Dr. Yulianti, S.H., M.H
NIP. 196207181988111001**

**Pembimbing II
Supervisor II**

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
NIP. 198111302010121005**

**Penguji I
Examiner I**

**Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H
NIP. 196212111989012001**

**Penguji II
Examiner II**

**Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
NIP.197205162000031002**

**Penguji III
Examiner III**

**Dr. Charles Simabura, S.H., M.H
NIP. 197904052005011005**

**Dekan
Dean**

**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001**

**Ketua Program Studi
Head Of Study Program**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Micho Algif Fahri
NIM : 2420112030
Program Kajian : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul:

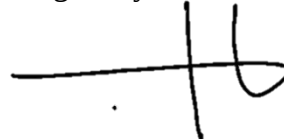
“REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA”

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 20 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Micho Algif Fahri
2420112030

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Micho Algif Fahri
NIM : 2420112030
Program Studi : Magister Hukum
Judul : **REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI
PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI
INDONESIA**

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

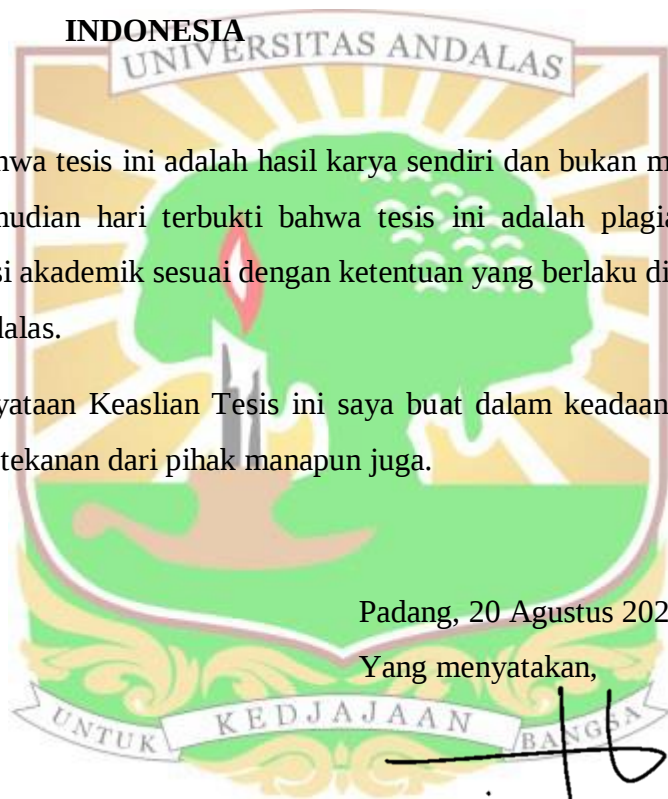
Demikian Pernyataan Keaslian Tesis ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Padang, 20 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Micho Algif Fahri

2420112030



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA”** sebagai persyaratan wajib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Studi Magister Ilmu Hukum. Tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan umat manusia yang menjadi pelita di tengah kegelapan yakni Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan izin Allah SWT.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua Ibuk Indrawati dan Bapak Rusdianto yang kasih sayangnya sepanjang masa. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan arahan serta motivasi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Serta ucapan terima kasih yang terdalem juga penulis sampaikan kepada dosen penulis yang mulia Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, juga Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang dengan kasih dan sayangnya telah memberikan waktu, masukan, arahan, serta nasihat yang bermanfaat kepada penulis dalam berproses.

Tak luput juga ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada dosen penguji Ibu Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H., Bapak Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., Bapak Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H., yang telah mengarahkan dan memberikan masukan keilmuan dalam diskusi yang menarik untuk penyelesaian naskah tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan atas segala bantuan dan dukungan kepada :

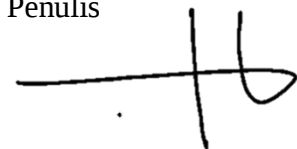
1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE.MPPM, Akt, CA., CRGP, selaku Rektor Universitas Andalas.

2. Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi beserta seluruh Staf Pengelola Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang selalu memberikan dukungan dan lingkungan yang hangat bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini.

Akhir kata penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang bersifat membangun penulis perlukan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Padang, 19 Mei 2026

Penulis



Micho Algif Fahri

REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENERAPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA

(Micho Algif Fahri, 2420112030, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2024)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Meskipun berfungsi sebagai *guardian of the constitution*, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 belum mencakup mekanisme *constitutional complaint*. Akibatnya, pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan atau kelalaian organ negara belum memiliki mekanisme penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dalam perlindungan hak konstitusional di Indonesia, berbeda dengan negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan yang telah menerapkan *constitutional complaint* sebagai instrumen perlindungan hak dasar warga negara. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara melalui penerapan *constitutional complaint* di Indonesia, dengan dua pertanyaan penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia? *Kedua*, apa urgensi rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pemberian wewenang *constitutional complaint* sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan pemulihan hak konstitusional warga negara di Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui instrumen konstitusional, legislasi, yudisial, dan mekanisme administratif. Namun, seluruh mekanisme tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap pelanggaran hak konstitusional yang timbul dari tindakan konkret organ negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas dalam melakukan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga belum dapat mengadili pengaduan konstitusional warga negara secara langsung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan mekanisme perlindungan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyempurnaan sistem hukum merupakan kebutuhan konstitusional guna penyempurnaan sistem hukum Indonesia serta memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, memperluas *access to justice*, serta mewujudkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis secara substantif.

Kata Kunci : *Constitutional Complaint*; Mahkamah Konstitusi; Perlindungan Hak Konstitusional

THE RECONSTRUCTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S AUTHORITY TO ENSURE THE PROTECTION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN INDONESIA

(Micho Algif Fahri, 2420112030, Master of Law Program, Faculty of Law,
Universitas Andalas, 2024)

ABSTRACT

This research is motivated by the limited jurisdiction of the Constitutional Court in providing effective protection of citizens' constitutional rights. Although the Constitutional Court serves as the guardian of the Constitution, its jurisdiction under Article 24C of the 1945 Constitution does not encompass a constitutional complaint mechanism. Consequently, constitutional rights violations arising from acts or omissions of state organs lack an effective judicial avenue for redress. This condition reveals a gap in Indonesia's constitutional rights protection framework, particularly in addressing concrete violations of constitutional rights. In contrast, countries such as Germany, South Korea, and South Africa have adopted constitutional complaint as an important mechanism for safeguarding citizens' fundamental rights against state actions that contravene the Constitution. This study aims to examine the reconstruction of the Constitutional Court's authority in ensuring the protection of citizens' constitutional rights through the adoption of a constitutional complaint mechanism in Indonesia. The research addresses two principal questions. First, how is the protection of citizens' constitutional rights currently implemented within Indonesia's constitutional system? Second, what is the constitutional necessity for reconstructing the Constitutional Court's authority by granting it jurisdiction over constitutional complaints as an instrument for protecting citizens' constitutional rights? This research employs a normative legal research methodology, utilizing statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings demonstrate that Indonesia has established various mechanisms for the protection and restoration of constitutional rights through constitutional, legislative, judicial, and administrative instruments. Nevertheless, these mechanisms remain insufficient because they are incapable of providing comprehensive protection against constitutional rights violations arising from concrete actions or omissions of state organs. The Constitutional Court's jurisdiction is currently confined to constitutional review of statutes against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and, therefore, does not extend to the direct adjudication of constitutional complaints filed by individual citizens. This limitation has created a legal vacuum (*rechtsvacuum*) within Indonesia's constitutional framework regarding the protection of constitutional rights. This study concludes that reconstructing the Constitutional Court's jurisdiction by incorporating the constitutional complaint mechanism constitutes a constitutional imperative for strengthening and refining Indonesia's legal system. Such a reform would enhance the protection of citizens' constitutional rights, broaden access to justice, reinforce the supremacy of the Constitution, and promote the substantive realization of the rule of law and democratic constitutionalism.

Keywords : Constitutional Complaint; Constitutional Court; Protection of
Constitutional Rights